

### **BAB III**

#### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

##### **A. Deskripsi Umum Objek Penelitian**

Secara astronomis, Kota Surabaya terletak di antara 1120 36' - 1120 54' Bujur Timur dan 70 21' Lintang Selatan. Secara geografis wilayah Kota Surabaya di sebelah utara dan sebelah timur berbatasan langsung dengan Selat Madura, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gresik.

Secara umum wilayah Kota Surabaya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3 – 6 meter di atas permukaan air laut, kecuali dataran rendah di sebelah selatan dengan ketinggian 25 – 50 meter di atas permukaan air laut. Kota Surabaya terbagi menjadi 31 kecamatan dengan luas wilayah sebesar 326,36 kilometer persegi. Luas wilayah antar kecamatan sangat bervariasi. Kecamatan terluas wilayahnya adalah Kecamatan Benowo, dengan luas sebesar 23,72 kilometer persegi, terletak di Surabaya Barat. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Simokerto yang luasnya sebesar 2,59 kilometer persegi terletak di Surabaya Pusat.<sup>34</sup>

Nama Surabaya muncul sejak awal pertumbuhan kerajaan Majapahit. Nama Surabaya diambil dari simbol ikan Sura dan Buaya. Simbol itu sesungguhnya untuk menggambarkan peristiwa heroik yang terjadi di kawasan

---

<sup>34</sup> Badan Pusat statistik Kota Surabaya tahun 2010

Ujung Galuh (nama daerah Surabaya di masa silam), yakni pertempuran antara tentara yang dipimpin Raden Widjaja dengan pasukan tentara Tar Tar pada tanggal 31 Mei 1293. Tanggal itulah yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya Kota Surabaya.

Awalnya Surabaya adalah kawasan perkampungan atau pedesaan di pinggiran sungai. Nama-nama kampung yang kini masih ada seperti Kaliasin, Kaliwaron, Kalidami, Ketabangkali, Kalikepiting, Darmokali, dan sebagainya adalah bukti yang menjelaskan bahwa kawasan Surabaya adalah kawasan yang memiliki banyak aliran air / sungai. Secara geografis ini sangat masuk akal, karena memang kawasan Surabaya merupakan kawasan yang berada di dekat laut dan aliran sungai besar (Brantas, dengan anak kalinya).<sup>35</sup>

Lokasi Surabaya yang berada di pinggir pantai, merupakan wilayah yang menjadi lintasan hilir mudik manusia dari berbagai wilayah. Surabaya, menjadi pertemuan antara orang pedalaman pulau Jawa dengan orang dari luar. Pada tahun 1612 Surabaya sudah merupakan bandar perdagangan yang ramai. Peranan Surabaya sebagai kota pelabuhan sangat penting sejak lama. Saat itu sungai Kalimas merupakan sungai yang dipenuhi perahu-perahu yang berlayar menuju pelosok Surabaya.

Jumlah penduduk Kota Surabaya dari hasil Sensus Penduduk 2010 sebesar 2.765.487 jiwa, dengan persentase penduduk laki-laki sebesar 49% dan perempuan sebesar 51%. Penduduk Kota Surabaya bila dilihat per kecamatan

---

<sup>35</sup> Badan Pusat statistik Kota Surabaya tahun 2010

jumlahnya sangat bervariasi. Penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Tambaksari yaitu sebanyak 204.205 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 101.353 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 103.452 jiwa. Sementara kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Bulak yaitu sebanyak 37214 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 18.760 orang dan penduduk perempuan sebanyak 18.454 orang. Rendahnya jumlah penduduk di Kecamatan Bulak dibandingkan dengan kecamatan lain di Surabaya diduga karena Kecamatan Bulak merupakan wilayah pemukiman baru yang lahannya masih berupa tambak.<sup>36</sup>

Distribusi kelompok umur penduduk Kota Surabaya hasil SP 2010 jumlahnya bervariasi, Jumlah penduduk paling banyak berada pada rentang usia 25-29 tahun yaitu sebesar 293.084 jiwa dengan rincian 145.605 jiwa penduduk laki-laki dan 147.479 jiwa penduduk perempuan. Sedangkan, jumlah penduduk paling sedikit berada pada rentang usia 95 tahun ke atas yaitu sebanyak 1.995 jiwa dengan rincian 824 jiwa penduduk laki-laki dan 1.171 jiwa penduduk perempuan.

Sex ratio di Kota Surabaya sebesar 97,74 persen. Hal ini menggambarkan dari 100 orang perempuan terdapat 98 laki-laki. Kecamatan yang sex rasionya yang diatas 100 persen menggambarkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibanding penduduk perempuan. Kecamatan Asemrowo memiliki nilai sex ratio terbesar yaitu 104,61 persen. Hal ini menggambarkan penduduk laki-laki di Kecamatan Asemrowo lebih besar. Sedangkan pada Kecamatan Gayungan

---

<sup>36</sup> Badan Pusat statistik Kota Surabaya tahun 2010

memiliki nilai sex rasionya sebesar 90,27 persen. Hal ini menggambarkan penduduk perempuan di Kecamatan Gayungan lebih besar dibanding penduduk laki-laki.

Pertumbuhan penduduk Kota Surabaya berdasarkan hasil registrasi penduduk dalam kurun waktu lima tahun angkanya berfluktuasi dan cenderung menurun. Pertumbuhan penduduk Kota Surabaya pada tahun 2006 sebesar 1,59 persen mengalami penurunan menjadi 1,16 persen pada tahun 2007. Kemudian pada tahun 2008 meningkat hingga 2 kali lipat dari tahun 2007. Pada tahun 2008 angka pertumbuhan penduduk Kota Surabaya sebesar 2,51 persen, ini merupakan pertumbuhan yang cukup signifikan dibanding dengan angka pertumbuhan penduduk pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2010 pertumbuhan penduduk Kota Surabaya kembali mengalami penurunan menjadi 0,98 persen. Hal ini disebabkan oleh berhasilnya program Keluarga Berencana (KB) di Kota Surabaya.

Struktur Ekonomi Kota Surabaya Tahun 2010 masih di dominasi oleh Sektor Perdagangan, Hotel & Restoran. Sektor Perdagangan, Hotel & Restoran mempunyai peranan terhadap perekonomian Kota Surabaya sebesar 45 %, hal ini sangat wajar karena Surabaya adalah ibukota Provinsi Jawa Timur dan merupakan pusat perdagangan di wilayah timur Indonesia.

Sebagai ciri kota yang telah maju peranan sektor primer yaitu sektor yang produksinya biasa diperoleh secara langsung dari alam seperti pertanian, pertambangan dan penggalian mempunyai peranan yang sangat kecil yaitu sebesar

0,09 % untuk sektor Pertanian dan sektor Pertambangan & penggalian hanya sebesar 0.01 % saja.

Selengkapnya peranan sektor ekonomi di Kota Surabaya tahun 2010 adalah sebagai berikut :

1. Pertanian 0,09 %,
2. Pertambangan dan Penggalian 0,01 %,
3. Industri Pengolahan 23,08 %,
4. Listrik, Gas dan Air Minum 3,71 %,
5. Konstruksi 6,28 %,
6. Perdagangan, Restoran dan Hotel 45,06 %,
7. Pengangkutan dan Komunikasi 10,26 %,
8. Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan 6,28, %
9. Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan 5,21 %.

APS adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia sekolah tertentu yang sedang sekolah dengan seluruh penduduk menurut kelompok usia yang sama dikalikan seratus. APS di Kota Surabaya untuk usia 7-12 tahun (usia SD), usia 13-15 tahun (usia SLTP) dan usia 16-18 tahun (usia SMU), dalam kurun waktu tiga tahun (2008 – 2010) mempunyai kecenderungan meningkat. APS untuk usia 7-12 tahun pada tahun 2008 sebesar 99,24% meningkat menjadi 99,74% pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 menurun menjadi 96,72%. APS untuk usia 13-15 tahun

pada tahun 2008 sebesar 91,19% meningkat menjadi 94,22% pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 menurun menjadi 89,41%.<sup>37</sup>

APS di Kota Surabaya untuk usia 16-18 tahun selalu menurun dari tahun 2008 ke tahun 2010. Pada tahun 2008 APS usia 16-18 tahun sebesar 87,37% menurun menjadi 82,37% pada tahun 2009 dan tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 64,67%. Angka melek huruf identik dengan kemampuan intelektual seseorang dalam menyerap informasi dan ilmu pengetahuan. Pada tahun 2008 angka melek huruf penduduk Kota Surabaya sebesar 97,94% meningkat menjadi 99,37% pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 angka melek huruf penduduk Kota Surabaya yang mengalami penurunan menjadi 97,58%.

Rata-rata lama sekolah di Kota Surabaya dari tahun 2008 ke tahun 2010 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2008 rata-rata lama sekolah penduduk Kota Surabaya selama 9,82 tahun meningkat menjadi 9,93 tahun pada tahun 2009. Pada tahun 2010 rata-rata lama sekolah penduduk Kota Surabaya mengalami penurunan menjadi 9,62 tahun. Indikator ini menggambarkan bahwa rata-rata penduduk Kota Surabaya bersekolah pada tahun 2010 hanya sampai jenjang pendidikan SMU kelas sepuluh (kelas satu.SMU).

Karena salah satu fungsi Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur. Dalam segi perguruan tinggi pun di Surabaya tidak kurang dari 60 perguruan tinggi ada di kota metropolis kedua ini, dan ini juga menyebabkan angka peserta didik dalam tataran sebagai mahasiswa juga semakin banyak baik yang perguruan

---

<sup>37</sup> Badan Pusat statistik Kota Surabaya tahun 2010

tinggi negeri ataupun swasta. Diantaranya adalah Institut Teknologi Sepuluh November, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Universitas Airlangga, Universitas Negeri Surabaya, Universitas 17 Agustus 1945, Universitas Kristen Petra, Unika Widya Mandala, Universitas Surabaya (UBAYA), Universitas Dr. Soetomo, Universitas Merdeka, Universitas Narotama, Universitas Wijaya Kusuma, Universitas Bhayangkara, Universitas Wijaya Putra, Universitas Muhammadiyah, Universitas Yos Sudarso, Universitas WR. Supratman, Universitas Putra Bangsa, Institut Teknologi Pembangunan, IKIP Widya Darma dan lain-lain.

## **B. Deskripsi Hasil Penelitian**

Dalam dunia pergerakan gagasan akan perubahan struktur yang tidak membela kepada rakyat merupakan hal yang harus ada dan diperjuangkan. Sudah banyak sekali perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh para kaum muda kita yang dalam penelitian ini saya menggarisbawahi adalah para mahasiswa yang dewasa ini sudah mulai dipertanyakan bentuk eksistensi dari jati diri mereka.

Rekam jejak perjuangan perlawanan terhadap pemerintah ini tidak sekali dua kali dilakukan. Selalu dalam bentuk oposisi pada pemerintahan siapapun merupakan ciri khas dari massa terdidik ini. melakukan controlling dan kritik tanpa memiliki kepentingan politis adalah bentuk eksistensi mereka, dikarenakan sekali mereka turun ke jalan maka identitas yang tersemat di dada mereka adalah sebagai rakyat Indonesia.

Hanya dengan bermodal semangat dan impian bisa melepaskan ketertindasan rakyat dari pemerintah saja yang menjadi bahan bakar mereka dalam melakukan setiap aksi di Surabaya. Berhadapan langsung dengan barikade polisi dan pagar berdurinya, belum lagi masih ditambah dengan sabetan tongkat dan pukulan dari aparat ketika mereka menganggap salah satu kelompok aksi melakukan suatu provokasi. Jalan utama pun dijadikan sebagai sarana bagi para masa aksi agar suara yang mereka teriakkan sedikit di dengar oleh para telinga tebal yang sedang duduk nyaman di kursi panas mereka masing-masing.

Berjalan menyusuri titik-titik pusat kota layaknya sebuah perjalanan ke medan perang sudah menjadi hal yang biasa bagi para mahasiswa ini. berpacu dengan teriknya sinar matahari dan asap kenalpot yang lebih banyak terhirup daripada udara itu sendiri menjadi bumbu dalam perjuangan mereka mengentaskan penderitaan rakyat Indonesia. Tidak ada sepeserpun uang yang mereka terima hanya segelas air mineral dan sebungkus nasi putih sebagai ganjalan perut yang menjadi penyambung nyawa mereka, karena pada saat itu kita semua sadar kalau kita sedang membela rakyat bukan para eksekutif ataupun kroni-kroninya yang menganggap nasib rakyat Indonesia adalah sesuai permainan catur, dimana rakyat diposisikan sebagai bidaknya, sehingga ketika kebijakan atau keputusan itu gagal maka tidak akan berimbas pada kehidupan mereka.

Dalam setiap moment peringatan hari besar bagi rakyat yang tertindas kajian terhadap isu-isu yang berkembang terus dilakukan dalam menemukan sebuah tolak ukur apakah hal yang kita aspirasikan ditanggapi oleh para penguasa kita. Termasuk didalamnya ketika memperingati hari tani, hari buruh, hari



kebangkitan nasional, hari kesaktian pancasila dan lain sebagainya. Semua upaya itu dilakukan agar para penguasa paham bahwa rakyatlah yang merebut kemerdekaan dari bangsa penjajah, dan jangan sampai bangsa yang direbut kebebasannya dengan tebusan nyawa ini kembali menjajah para pejuang-pejuangnya.

Dalam melakukan aksi demonstrasi pada umumnya para mahasiswa membentuk sebuah aliansi-aliansi yang berfungsi sebagai penggalangan massa yang merasa sepenanggungan dan memiliki cita-cita yang sama. Kelompok-kelompok ini bersifat sangat kondisional, jadi kelompok yang mereka buat jika memiliki anggota yang tetap maka sistem pengkaderan akan terus berlanjut, akan tetapi yang paling banyak terjadi bahwa aliansi ini menjadi satu dan besar ketika mereka tergabung bersama.

Sebelum melakukan aksi demonstrasi terlebih dahulu dilakukan tahapan-tahapan yang memerlukan waktu setidaknya lebih dari 2 minggu untuk menyiapkan segala persiapan yang harus dipenuhi agar aksi bisa berjalan maksimal, hal pertama yang harus dilakukan adalah konsolidasi, atau menjalin ikatan sesama mahasiswa baik yang ada di dalam satu kampus atau lintas kampus di Surabaya. Hal ini sesuai dengan penuturan Ilham Irfani selaku ketua Left Democratic force Surabaya:

“Hal terpenting dalam melakukan perlawanan terhadap pemerintah adalah dengan memiliki jaringan seluas-luasnya. Dikarenakan jika kita tidak memiliki basis massa yang kuat pasukan yang kita miliki akan dengan mudah ditumbangkan oleh aparat yang menjaga aksi, dan pesan kita pun akan sulit mendapat perhatian oleh pemerintah. Untuk aksi-aksi memperingati sesuatu yang sifatnya hanya merupakan control akan

kebijakan mungkin gak masalah kita turun ke jalan dengan massa aksi sedikit, tapi jika kita memiliki suatu tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah kita perlu menggalang massa sebanyak mungkin sebagai bentuk gambaran rakyat Indonesia yang menolak akan kebijakan itu. Anggaplah sebuah contoh kasus kenaikan BBM yang kemarin dari LDF sendiri menurunkan tak kurang dari 200 peserta aksi ke jalan untuk menuntut dibatalkannya kenaikan harga BBM dan memaksa supaya SBY turun dari kursi presidennya karena sudah kami anggap dia gagal. Dalam melakukan masa konsolidasi ini jaringan komunikasi sangat penting, dari komunitas satu ke komunitas lain saling memberi informasi dan meminta kejelasan mereka bagaimana menentukan sikap dalam kasus yang sedang diangkat. Setelah itu baru diadakan pertemuan intens sampai pada hari pelaksanaan aksi. Ada salah satu alasan kenapa mahasiswa dijadikan sebagai tonggak akan perubahan di negeri ini. dikarenakan agenda yang mereka perjuangkan sangat populis, dan realistis. Mahasiswa lah yang bisa membangkitkan semangat perlawanan rakyat terhadap rezim tiran. Mahasiswa-lah yang bisa mengawal reformasi hingga ke titik tujuan. Rakyat menaruh harapan atas kekuatan intelektual dan kekuatan aksi yang mahasiswa miliki.”Jadi, pahami dirimu dan sekitarmu, dan mari kita bergerak lagi ! Reformasi belum usai” Dengan kekuatan intelektual di atas rata-rata masyarakat awam, mahasiswa memiliki kemudahan untuk mengakses berbagai informasi wacana dan peristiwa dalam lingkup lokal hingga internasional. Begitu juga dengan kemudahan akses literatur ilmiah dan gerakan-gerakan pemikiran, yang pada tujuan akhirnya akan menentukan ideologi atau sistem hidup yang akan dijalaninya. Buku yang ia baca, informasi yang ia terima, tokoh-tokoh yang ia ajak bicara, adalah beberapa faktor utama yang kelak sangat berpengaruh terhadap idealisme hidupnya. Selain kekuatan intelektual yang identik dengan aktivitas ilmiah, mahasiswa juga memiliki kewajiban untuk menguatkan potensi kepekaan sosial politiknya. Disebut kepekaan sosial karena mahasiswa pada dasarnya adalah bagian dari rakyat. Apapun yang terjadi pada rakyat maka mahasiswa akan turut juga merasakannya.<sup>38</sup>

Jelas dapat kita lihat disini bahwa dalam melakukan konsolidasi banyak sekali elemen yang tergabung didalamnya. Otomatis hal ini menyebabkan heterogenitas yang sangat beragam didalamnya. Lagi-lagi peranan mahasiswa menjadi sangat sentral disaat ada kebijakan yang sangat merugikan rakyat. Tanpa dikomando mereka langsung mengadakan konsolidasi dan merancang upaya untuk membela rakyat. Mahasiswa dengan segala aktivitas akademisnya dikampus

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Ilham Irfani LDF Surabaya pada 02 April 2012

diharap mampu untuk mengimbangi scenario-skenario yang dibuat pemerintah untuk mengelabui rakyat. Banyaknya buku dan pengetahuan yang ada membuat perspektif yang mereka miliki lebih luas, serta idealisme yang masih murni sedikit banyak akan menghindarkan mereka dari kepentingan dan tendensi dari pihak lain.

Tahapan selanjutnya adalah mengkaji isu-isu yang ada serta melakukan analisi yang mendalam terhadap isu-isu tersebut. Dikarenakan jika tidak dikaji secara mendalam kita akan terjebak dengan isu-isu permukaan atau isu pengalih dan tidak menemukan masalah sentralnya, hal ini sering kali terjadi jika sedang ada isu besar di expose secara besar-bearan pula oleh pihak media, seringkali media menjadi pisau bermata dua, ketika mereka membongkar sisi jelek dari pemerintahan, itu akan membuat kita tersadar akan bobroknya pemerintahan yang ada di Negara kita, tapi jangan lupa bahwa media juga sebuah perusahaan yang juga mencari keuntungan di dalamnya. Terkadang para penguasa menggunakan media untuk memunculkan isu lain untuk menutupi isu yang mereka anggap berbahaya, kita ambil contoh pada kasus BBM kemarin, ketika sedang hangat-hangatnya di bicarakan ternyata ada yang mengalihkan isu ini ke isu binatang Tomcat yang menyerang wabah. Tidak ada dalam sejarah ketika isu wabah serangga seperti ini masuk dalam KLB atau kejadian Luar Biasa, sampai presiden pun angkat bicara. Hal ini yang menyebabkan masyarakat terkecoh dan tidak lagi focus dengan kebijakan public yang sesang berlangsung. seperti halnya yang diungkapkan oleh Iqbal dari SMI

“.....Walaupun kita dah bisa menggalang massa yang banyak pertanyaan berikutnya adalah apakah kita bisa menyatukan mereka semua pada satu pemikiran mengingat mereka juga dari latar belakang kampus dan jurusan yang berbeda-beda pula. Maka dari itu hal ini yang memakan waktu paling banyak biasanya kita lakukan sampai 4 hari berturut-turut untuk mendapatkan kata sepakat dan supaya kita terbebas dari tendensi pihak manapun. Kajian isu yang kita lakukan dengan cara masing-masing ketua komunitas menyampaikan pengetahuan mereka mengenai isu yang sedang dikaji setelah itu kita gabungkan dan mengambil sebuah keputusan bersama isu mana yang diangkat dan dijadikan kritik kepada pemerintahan yang sedang berjalan. Hasil dari kajian dan analisis isu ini pada akhirnya dijadikan sebagai press rilis dari aksi demonstrasi dan menjadi sumber data untuk orasi yang akan dilakukan selama aksi. Setelah itu ada Proses pbingkaian (framing) merupakan proses konstruksi makna dalam gerakan sosial dimana berbagai macam peristiwa (occurrences) dan realitas yang terkait dengan gerakan disederhanakan dan dipadatkan dengan tujuan memobilisasi adherents dan konstituen potensial, memperoleh dukungan dari by stander, serta mendemobilisasikan antagonis. Proses ini akan menghasilkan bingkai aksi kolektif yang akan memberikan label dan identitas khusus pada gerakan sosial yang akan kita lakukan dalam semesta gerakan yang ada. Proses pbingkaian pada dasarnya meliputi proses diaknosa, untuk mendefinisikan masalah dan mengidentifikasi penyebab masalah; prediksi ( prognostic framing), untuk mendefinisikan target, strategi dan taktik untuk memecahkan masalah;serta justifikasi (motivation framing), untuk membangun pbenaran bagi tindakan tersebut.<sup>39</sup>

Setelah melakukan analisis terhadap isu yang akan diangkat pada saat aksi hal lain yang tidak kalah penting adalah mempersiapkan strategi gerakan aksi itu sendiri, seperti yang kita ketahui bahwa mekanisme dan keadaan sosial pada zaman ini sangatlah berbeda dari masa-masa sebelumnya. Arus utama dalam pembacaan atas situasi penindasan tidak akan bisa dilepaskan dari sebuah era “globalisasi”. Karena di era inilah, sekarang ini kita hidup dan menghadapinya dengan segala ketidakpastian. Ilmuan yang mengkaitkan globalisasi dengan situasi penindasan.

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Iqbal SMI

Dengan berpijak pada tiga doktrin barat, yaitu liberalisasi (kebebasan dalam arti ekonomi), deregulasi (tidak adanya peraturan negara yang mengatur lalu lintas barang/jasa dan tidak ada subsidi bagi rakyat) serta privatisasi (swastanisasi, BUMN harus dijual kepada pihak swasta atau pemodal), neoliberalisme berjalan melewati setiap negara yang sudah tidak berdaya karena lilitan hutang luar negeri (HLN). Dengan tekanan HLN, inilah para negara door-kapitalis (Uni Eropa, USA dan Jepang) membuat peraturan-peraturan yang dipaksakan bagi negara dunia ketiga untuk meliberalisasi kehidupannya.

Lembaga-lembaga seperti *International Monetary Fund (IMF)*, Paris Club, CGI dan WTO menjadi sangat efektif dalam melakukan kerja-kerja imperialisme dengan baju globalisasi. Setelah penghambat (peraturan Bea dan Cukai dan lain-lain) bagi perdagangan bebas sudah bisa dikendalikan perusahaan-perusahaan yang dimiliki negara kapitalis mulai menancapkan kukunya di negeri ini. Pada saat inilah, budaya lokal dan aset kekayaan alam lainnya akan disedot habis oleh investor asing dan akhirnya kita menjadi terasing di negeri sendiri. Dan yang lebih parah, kita menjadi budak di negeri sendiri dengan upah yang sangat murah.

Dalam relasi penindasan demikian, masyarakat kita sebagian besar tersituasikan pada posisi yang semakin hari semakin memprihatinkan. Petani tidak bisa menjual gabah dan padinya dengan harga yang tinggi karena kalah bersaing dengan padi dari luar. Hal yang sama kita jumpai pada komoditas gula, buah-buahan dan barang keseharian lainnya. Dalam kondisi itu negara sudah tidak berdaya lagi karena tekanan dari Lembaga Donor untuk tidak memberikan subsidi pada rakyat. Kenaikan BBM, listrik dan telephon adalah imbas dari pemotongan

subsidi demi pembayaran hutang. Demikian juga kenaikan biaya pendidikan juga bisa dilihat dari perspektif ini. UU no 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS adalah gambaran dari gelagat negara yang ingin melepas tanggungjawabnya atas subsidi pendidikan, sehingga membuka peluang terjadinya komersialisasi dan kapitalisasi pendidikan. Persoalan bertambah runyam ketika pondasi perekonomian kita semakin lemah dan berimbas pada sektor tenaga kerja yang semakin kehilangan lapangan pekerjaan.

Dalam konteks semakin cepatnya laju dan arus globalisasi, kita malah secara politik masih sibuk dengan pertarungan kepentingan kelompok-kelompok elit yang sebagian besar tidak memihak rakyat. Pertarungan elit, baik di level eksekutif, legislatif maupun partai yang kadang di antaranya melibatkan kekuatan militer, akhirnya berimbas pada kehidupan sosial politik masyarakat yang terpecah belah. Separatisme, konflik berbasis SARA adalah beberapa contoh yang bisa disebutkan sebagai imbas dari amburadulnya budaya politik di level negara. Di sisi budaya kita sedang digiring untuk menjadi orang yang tercerabut dari akar sejarah dan budayanya. Kita semakin bangga kalau kita semakin Barat dan bisa meniru mereka pada sisi kehidupan yang sekecil-kecilnya. Kita tidak sadar sedang didorong untuk menjadi orang *konsumeris* untuk menjadi pelanggan dari pasar yang dibuka oleh orang barat. Watak ini dalam sejarah bangsa kita sering disebut dengan watak **inlander**.

Dari sekian pembacaan-pembacaan atas situasi penindasan dan situasi kemasyarakatan di atas, kita mencoba membuat sebuah pola umum untuk memudahkan membuat strategi perlawanan dan situasi-situasi apa saja yang harus

dibuat. Untuk ini, perlu melihat tulisan Eman Hermawan (2001) yang membagi masyarakat dalam tiga lokus, yaitu : *Civil society* (masyarakat sipil), *political society* (masyarakat politik) dan *economical society* (masyarakat ekonomi).

Dalam setiap aksi yang dilakukan persiapan yang tidak kalah penting berikutnya adalah perangkat aksi dan perizinannya. Dikarenakan jika kita tidak mengurus perizinan maka aksi kita dapat dikatakan sebagai aksi yang illegal dan itu memiliki konsekuensi dari hukum yang berlaku, hal ini seperti apa yang dituturkan oleh Kholis LMND sebagai berikut:

“salah satu yang tidak boleh terlupakan pada saat aksi demonstrasi adalah yang pertama yaitu perizinan ke pihak kepolisian, walaupun pada saat dilapangan kita seakan-akan menjadi dua kubu yang saling berlawanan tapi dalam peraturannya kita harus memiliki izin tertulis dari kepolisian. Yang bertanggungjawab mengurus semua itu adalah korlap Aksi yang dipilih pada masa konsolidasi berlangsung, korlap juga bertanggungjawab mulai dari aksi dimulai sampai berakhir. Dan apabila ada dari pihak pers ingin mencari informasi maka korlap juga yang harus menghandlenya karena informasi dari aksi harus satu pintu, supaya tidak terjadi kerancuan akan informasi yang diberikan. Sebelum aksi dilakukan terlebih dulu kita juga harus menyiapkan berbagai perangkat aksi yang akan kita bawa, contohnya yaitu semisal bendera komunitas atau organisasi, spanduk yang bertuliskan tuntutan, megaphone lagu-lagu perjuangan dan lain sebagainya, dalam mempersiapkan Keputusan aksi sebaiknya didiskusikan secara matang analisis SWOT-nya. Organisasi aliansi kampus mempunyai mekanisme yang berbeda namun hampir sama dengan mahasiswa ekstra. Di ekstra jalur pengambilan keputusan lebih pendek sehingga keputusan aksi dapat lebih cepat dieksekusi. Secara garis besar mekanisme lahirnya keputusan aksi adalah sbb : 1. Diskusi awal (Tim/Dept. Khusus : bidang Sospol), diteruskan ke : 2. Diskusi Lanjutan (pelibatan kader, (unsure kelompok lain), menghadirkan pakar, penerbitan Pers Release), lalu 3. Pembentukan Tim Teknis Aksi 4. Aksi di lapangan dan Dalam merancang aksi, hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah : planning aksi, perangkat aksi, pelaksanaan, dan kegiatan paska-aksi. Planning Aksi Dalam tahap perencanaan aksi, hal urgen yang perlu diperhatikan adalah : 1. Tema / Grand Issue. Pilihlah tema atau isu yang sedang hangat menjadi bahan pembicaraan (up to date) atau relevan atau sesuai dengan kebutuhan organisasi yang bersangkutan. Kemudian fokuskan, agar informasi atau opini yang hendak dibangun tidak bias. 2. Susun target. Baik target teknis

seperti pencapaian jumlah massa dan blow up media, dan target esensi seperti isu tuntutan aksi. Begitu juga target siapa yang pihak yang hendak dituju. 3. Skenario. Seperti halnya film, aksi butuh skenario, yang menjadi acuan bergeraknya aksi. Skenario ini mencakup rute, tokoh orator, happening art, dan acara lainnya. Sebaiknya skenario disiapkan lebih dari satu. Jika ada sesuatu hal di lapangan tak memungkinkan berjalannya sebuah skenario, dapat diganti dengan skenario lain (plan B). Massa: Dalam aksi yang mengandalkan massa, strategi penggalangan massa menjadi penting, demikian juga dengan cara mengendalikan massa jika massa berjumlah besar. 4. Pemberitahuan Tergantung pada kebutuhan. Jika kita memutuskan untuk menulis pemberitahuan, maka lakukan sesuai dengan UU No. 9/1998. Begitu juga dengan pemberitahuan kepada media massa (release awal) agar kelak mereka dapat meliput kita. Karena itu perlu diperhatikan sebuah momen yang khusus didesain untuk konsumsi jurnalis foto, selain press release untuk jurnalis berita. 5. Format: dalam suatu Format atau bentuk aksi adalah pilihan dari banyak bentuk aksi. Pilihannya ada dua, format kekerasan atau nirkekerasan. Sebagai gerakan moral, maka seyogyanya aksi mahasiswa bersifat nirkekerasan. Aksi nirkekerasan ini sangat bervariasi sekali. Dimulai dari aksi diam (bisu), orasi, happening art, aksi topeng, mogok makan, hingga ke blokade, pengepungan, dan boikot. Perangkat Aksi Perangkat aksi adalah person-person yang terlibat dalam suksesnya sebuah aksi. Mereka diantaranya adalah :

1. Korlap: yakni Koordinator Lapangan adalah pemegang komando ketika aksi sedang berjalan. Peserta aksi harus mentaati setiap arahan dari korlap. Korlap memperoleh masukan informasi dari perangkat lain yang akan digunakannya untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Korlap juga yang bertugas menjaga stamina massa agar tidak loyo dan tetap konsentrasi ke aksi. Korlap bukanlah amanah instant. Ia diperoleh dari proses jangka panjang. Korlap adalah orang paling mengerti tentang isu yang sedang diperjuangkan, sehingga wawasan pengetahuannya dapat dikatakan lebih banyak dari yang lainnya. Korlap dapat juga berorasi.
2. Orator : Terkadang diperlukan orator khusus selain korlap, khususnya pada aksi aliansi atau aksi yang melibatkan tokoh. Para orator ini menyampaikan orasi berdasarkan isu yang telah disepakati bersama. Bobot suatu orasi ditentukan oleh susunan kalimat, data up to date, dan kualitas pernyataan sikap. – Agitator peran dari sector ini adalah pembangkit semangat massa dengan pekik teriakan disela-sela orasi korlap dan orator. Ia juga membantu korlap untuk menjaga stamina massa dengan memimpin lagu dan yel-yel.
3. Negosiator: Terkadang diperlukan person yang khusus bertugas untuk melakukan negosiasi. Negosiasi ini dilakukan kepada aparat polisi atau pihak-pihak yang ingin dituju jika aksi di-setting audiensi.
4. Humas: Tim Humas adalah salah satu elemen penting aksi. Tim humas bertanggung jawab dalam menjembatani aksi kepada para jurnalis. Mereka membuat pers release. Bobot Pers Release itu dibuat berdasarkan nilai-nilai jurnalistik. Disebut sukses jika media tidak bias memuat tuntutan atau opini yang hendak digulirkan oleh aksi.
- 5.



Security/border: Tim ini bertugas menjaga keamanan peserta aksi. Mereka juga wajib untuk mengidentifikasi para penyusup atau aparat yang hendak memprovokasi agar aksi berakhir chaos. Tim ini memiliki bahasa tersendiri yang hanya diketahui oleh sedikit orang dari peserta aksi. 6. Dokumenter: Tim ini memback-up tim humas. Tetapi inti tugasnya adalah mendokumentasi aksi dari awal hingga akhir serta membuat kronologis aksi. Dokumentasi ini dengan kamera, handycam ataupun notes. Data ini akan digunakan sebagai bukti otentik jika aksi mengalami kekerasan dari aparat atau massa lain. 7. Medik: Tugas ini memang spesifik bagi mereka yang menguasai ilmu medis. Umumnya adalah mahasiswa kedokteran atau mereka yang pernah terlibat dalam aktivitas kepalangmerahan atau bulan sabit merah. Tim ini memberikan pertolongan pertama kepada peserta aksi yang mengalami cedera.- Logistik Dalam aksi yang disetting lama dan melelahkan. Tim logistik bertugas untuk menyediakan sarana untuk membugarkan peserta aksi seperti air minum, snack dan sound sistem. Terkadang, mereka juga membuat dan mendesain kertas tuntutan atau karikatur. 8. Tim kreatif: Tim ini memiliki kewenangan untuk mendesain sebuah atraksi seni atau instalasi sesuai amanat hasil musyawarah. Pelaksanaan dan Pasca Aksi Saat massa telah terkumpul di tempat yang telah ditentukan, maka korlap sebaiknya tidak langsung memberangkatkan peserta aksi sebelum persiapannya matang. Selain itu perlu juga adanya pemanasan (warming up) dengan cara melatih yel-yel atau orasi untuk pencerdasan peserta aksi. Warming-up ini bertujuan untuk mensolidasi peserta aksi. Setelah kompak, solid, dan cerdas barulah aksi dimulai. Saat aksi, peserta wajib menghormati komando korlap dan turut menjaga keamanan aksi hingga aksi usai. Jika aksi disetting serius atau aksi bisu maka peserta harus menjauhkan dari kegiatan senda gurau dan ketidakseriusan. Seusai aksi, maka peserta harus mengadakan Evaluasi untuk dilakukan untuk meningkatkan kualitas aksi berikutnya. Tim humas juga memonitoring media untuk memantau keberhasilan blow-up media dan tingkat ke-bias-an tuntutan<sup>40</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat kita lihat bahwa membuat atau menyetting sebuah aksi bukanlah sesuatu yang mudah. Butuh mekanisme di dalamnya serta pembagian tugas yang tidak sedikit. Untuk bisa mengadakan aksi yang besar tentu saja juga mendatangkan massa yang besar pula, tapi untuk menjaga massa kita juga bukan hal yang mudah satu korlap didepan tidak bisa mengendalikan seluruh massa.

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Kholis LMND pada tanggal 03 April 2012

Grand issue layaknya menjadi faktor terpenting dalam melakukan aksi Demonstrasi, karena ini sangat berhubungan dengan pembentukan opini dan tuntutan kita. Grand issue yang terbangun juga menentukan aksi kita mau diarahkan kemana, dalam arti lain target dari aksi ini ditujukan kepada siapa, pejabat daerah atau pejabat pusat. Beberapa sentral aksi di Surabaya yakni seperti kantor Walikota atau yang biasa disebut warga Surabaya sebagai Grahadi, kantor Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang merupakan kantor Gubernur Soekarwo, DPRD Kota Surabaya, serta DPRD Jawa Timur. Tempat-tempat ini yang sering kali sebagai tempat tujuan aksi di kota Surabaya.

Dalam melaksanakan sebuah aksi scenario berjalannya aksi mulai dari awal sampai akhir harus juga disiapkan, dikarenakan ketika aksi tidak sesuai lagi dengan settingan awal maka korlap bisa langsung mengambil alih dan mengkondisikan kembali massanya. Sebab apa yang terjadi di lapangan tidak dapat kita prediksi. Ketika ada provokasi dari pihak luar maka aksi kita akan menjadi amburadul. Maka dari itu sebelum aksi dimulai terlebih dahulu seuruh massa aksi diberitahu tentang format aksi yang akan dilancarkan. Hal ini penting dikarenakan jika ada Chaos atau bentrok ketika aksi maka para massa aksi kita sudah bersiap-siap. Rata-rata aksi yang diadakan untuk menuntut sebuah perubahan kebijakan memang disetting Chaos, akan tetapi yang perlu digaris bawahi disini adalah kebanyakan di pemberitaan media penyebab bentrok selalu mahasiswa. akan tetapi sebaliknya kenyataan yang sebenarnya di lapangan pihak aparat yang selalu memprovokasi massa. Bahkan pada aksi gabungan pada tanggal 29 Maret kemarin Kapolrestabes Sendiri yang memerintahkan untuk

menyerang mahasiswa agar aksi segera bubar. Tentu saja dengan satu komando dari atasan pasukan kepolisian langsung memukuli mahasiswa dengan tongkat kayu yang mereka pegang, bahkan acapkali mereka menodongkan senjata laras panjangnya juga ke arah pendemo. Protap seringkali diterapkan tidak pada tempatnya, tapi ketika massa aksi yang kami bawa ini melampaui jumlah petugas yang berjaga maka tidak satupun dari mereka yang berani menyerang kami.

Disetiap aksi yang dibuat harus ada pembagian tugas secara menyeluruh agar aksi berjalan dengan lancar. Pembagian tugas ini diberikan sesuai dengan kemampuan dari massa aksi yang ditunjuk, mulai dari Korlap beserta asternya, setelah itu yang memiliki suara yang lantang diposisikan sebagai orator dan agitator, yang memiliki kemampuan untuk berdiplomasi diberi tanggung jawab sebagai negosiator, dan yang bertugas menjaga supaya massa aksi tetap ada di barisan yakni sebagai Security atau border. Serta yang tak kalah penting adalah di bidang humas yakni yang juga bertindak sebagai juru bicara aksi. Pemberitaan di media bisa jadi berbeda dengan kenyatannya jika juru bicara aksi tidak bertindak sesuai scenario yang telah ditetapkan. Media menjadi sangat penting Karena yang melihat aksi kita di jalanan mungkin hanya beberapa orang saja sedangkan media memberitahu jutaan mata di seluruh penjuru negeri. Jadi jika yang diberitakan tidak sesuai maka yang diketahui banyak orang juga merupakan sebuah kesalahan. Jadi dapat digarisbawahi disini bahwa media juga memiliki peranan sangat sentral dari setiap aksi yang dijalankan.

Dalam menjalankan setiap aksinya mahasiswa memang selalu memilih tempat-tempat yang dianggap sentral agar suara mereka di dengar oleh para

penguasa yang ada dibalik pagar. Terkadang memang ada forum dialog dengan pihak pemerintah akan tetapi hal itu jarang sekali menampakkan hasil, aspirasi kami hanya di dengar setelah itu disimpan jadi tidak ada sama sekali langkah kongkrit dari pemerintah dalam penyelesaian masalah rakyat. Tidak tahu apakah memang kerjaan mereka terlalu banyak atau memang pada dasarnya mereka tidak pernah mengurus nasib rakyat. Seperti apa yang dikatakan oleh basuki SPI sebagai berikut:

“..... sebenarnya yang membuat bentrok duluan itu yang membuat ulah pihak aparat. Kita sedang orasi tapi mereka menyuruh kita hanya orasi di trotoar saja, padahal yang kita inginkan cuma aspirasi kita supaya di dengar, dengan bersenjatakan perisai dan pentungan mereka terus menyuruh kami agar segera minggir dari badan jalan. Hal ini memang sengaja mereka lakukan agar terjadi bentrok dan aksi yang kita lakukan agar cepat selesai, tidak jarang kita juga sering ditodong dengan menggunakan senjata mereka. jadi jelas bahwa aparat digunakan dengan cara yang sangat represif oleh penguasa untuk menghabisi mahasiswa. bom-bom gas air mata juga sering menghinggapi tubuh kami. Yah kalau Negara ini sudah tidak mau dikritik lagi mending langsung saja ganti ke model kerajaan jangan memakai demokrasi di negeri ini. didalam diri kita tidak ada keinginan sampai terjadi kerusuhan ketika mengadakan aksi. Tapi pihak aparat selalu memposisikan kita sebagai musuh ketika aksi itu dimulai. Jadi ketika Negara ini diejek oleh Negara lain tidak ada yang mau bergerak untuk mempertahankan harga diri bangsa, akan tetapi ketika berhadapan dengan pihak mahasiswa, sampai kendaraan perang seperti mobil barakuda juga disiapkan untuk menumpas aksi mahasiswa. hal yang sama juga pernah terjadi pada saat kerusuhan Mei 1998 yang menewaskan 4 orang mahasiswa. dan kematian itu disambut riang gembira oleh para aparat keamanan, dalam pandangan mereka seakan-akan telah membunuh musuh Negara. Keagresifan itu tidak lepas dari komando langsung presiden pada saat itu, yang juga berasal dari dunia militer. Agresifitas yang ditunjukkan tak ubahnya seperti strategi militer dalam mengalahkan lawannya.<sup>41</sup>

Pasca kerusuhan Mei 1998 pun Negara ini masih belum menemukan bentuknya yang sempurna. Betapa tidak pengulangan kebijakan pada masa awal

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan basuki SPI pada tanggal 04 April 2012

orde baru kembali diterapkan pasca reformasi yakni dengan cara memasukkan sebagian besar para aktivis 1998 kedalam parlemen sehingga gerakan aksi mahasiswa pasca itu benar-benar mati sampai sekarang. Monopoli politik yang begitu besar di Negara ini mungkin saja tidak bisa dibunuh secara permanen. Kekhawatiran akan presiden dari pihak militer sebenarnya sudah banyak merebak ketika Susilo Bambang Yudhoyono mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Ketakutan ini bukan tanpa alasan dikarenakan pada masa sebelum ini 32 tahun bangsa Indonesia bagaikan dibawah garis kolonialisme untuk yang ketiga kalinya setelah Belanda dan Jepang, hal ini seperti apa yang dikatakan oleh Cona KamusPR<sup>42</sup>:

Pada saat pertama kali SBY mencalonkan diri sebagai presiden sebenarnya sudah ada kekhawatiran diantara internal kampus bahwa SBY ini akan mengulangi masa Soeharto, banyak sekali kepentingan-kepentingan rakyat yang dikorbankan hanya untuk manuver politik dia saja. Dan kejahatan di wilayah dunia kampus pun kembali terulang dengan dikeluarkannya Undang-undang badan Hukum Pendidikan yang merupakan bentuk lepas tangannya pemerintah terhadap dunia pendidikan, akibat dari undang-undang tersebut semua instansi pendidikan mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi harus memenuhi biayanya sendiri. Alhasil masing-masing diantara mereka saling berebut menjadikan diri mereka yang terbaik dengan menggunakan dalih sekolah berstandar internasional dan lain sebagainya. Sehingga anak-anak dari golongan menengah kebawah tidak akan pernah lagi menikmati pendidikan yang setara, mereka para kaum miskin memang ada dana BOS tapi di masing-masing sekolah ada stratifikasi didalamnya dengan diidentifikasi ada murid reguler dan murid standar internasional. Dalam dunia kampus biaya SPP setiap tahunnya juga semakin naik, hal ini sama dengan kampus-kampus swasta jadi sudah tidak ada perbedaan lagi diantara keduanya. Belum lagi biaya hidup yang ditanggung oleh mahasiswa. hal ini yang menyebabkan mahasiswa akan cenderung apatis terhadap wilayah aktivisme kampus. Karena yang mereka pikirkan adalah bagaimana lulus dengan cepat, metode seperti ini sebenarnya sama dengan pemberlakuan NKK/BKK tapi dengan cara yang lebih halus, yang mana NKK berfungsi untuk menjustifikasi pembubaran dan dihilangkannya organisasi mahasiswa yang

selama ini merupakan sarana demokratis mahasiswa [dalam menyuarakan kritik terhadap pemerintah].” Dalam kebijakan NKK, politik dibedakan ke dalam tiga pengertian yaitu politik dalam arti konsep (concept), dalam arti kebijakan (policy), dan dalam arti arena percaturan (politics). Politik dalam arti konsep berarti mengajukan gagasan, pikiran, interpretasi mengenai apa yang dianggap sebagai kepentingan publik. Pengajuan gagasan ini lengkap dengan pencantuman program aksi dan tujuan yang hendak dicapai melalui program tersebut serta bagaimana cara yang dipakai. Dalam rasionalisasinya atas NKK, pemerintah berkeinginan melatih mahasiswa untuk berpikir konseptual-teoritik dan sistematis. Politik dalam artian policy mengeksplisitkan bentuk-bentuk tindakan nyata individu atas masalah masyarakat ataupun negara. Sementara politik dalam artian ketiga, yaitu sebagai arena, merupakan media di mana masing-masing individu atau kelompok yang punya konsep dan kebijakan, saling bertarung satu sama lain, di mana masing-masingnya memiliki sasaran, kepentingan, ide, bahkan ideologinya sendiri-sendiri. Dari tiga arti politik yang dimaksudkan pemerintah ini, maka satu-satunya pengertian yang boleh diterapkan mahasiswa hanya dalam arti pertama, yaitu ‘konsep.’ Hak politik yang diberikan kepada mahasiswa sebab itu hanyalah memperbincangkan masalah politik dalam lingkup ‘tembok’ kampus dan tidak untuk dioperasionalkan ke masyarakat, apalagi membangun gerakan dalam bentuk protes demonstratif. Kebijakan NKK yang merupakan kesinambungan dari keputusan pembekuan Dewan Mahasiswa, lalu juga diikuti dengan pembentukan Badan Koordinasi Kampus (BKK) sebagai operasionalisasinya. Dengan bekunya Dewan Mahasiswa, maka perangkat yang menjadi wahana aktivitas mahasiswa menjadi tidak ada lagi, dan digantikan BKK. maka dari itu pada essensinya SBY sebenarnya lebih mematikan dua kali lipat dari pada pada zaman Soeharto maka dari itu kami disini dan semua aliansi menuntut bagaimana caranya agar SBY turun dari jabatan Presidennya.<sup>43</sup>

Dalam segi strategi politik yang digunakan tampaknya SBY dua kali lebih cerdas dari soeharto. Dengan bermodalkan separuh lebih anggota partai yang duduk di kursi parlemen serta pasukan koalisi yang sangat banyak, membuat segala kebijakan presiden yang masuk ditataran sidang paripurna tidak menemui kendala apapun. Kasus bank century menjadi bukti nyata dan jelas lepasnya para pencair dana fiktif yang ujung dari aliran dananya sampai sekarang belum jelas keberadannya. Back up dari kelas penguasa terbukti bisa melepaskan semua

<sup>43</sup> Wawancara dengan cona kamusPR pada tanggal 05 April 2012

tersangka dari jeratan hukum walaupun yang menginspeksi sekelas anggota DPR. Bahkan salah satu diantaranya jadi salah satu direksi bank dunia.

Hal yang sama juga terjadi pada saat pengesahan UU BHP, berulang kali mahasiswa turun kejalan tapi tidak ada respon sama sekali, dan apa yang ditakutkan benar-benar terjadi ketika tiap tahunnya biaya pendidikan semakin mahal. Di kalangan civitas akademika kampus orientasi mahasiswa kembali hanya terfokus kepada pencapaian hasil belajar saja pada titik ini apatisme mahasiswa sudah mulai muncul dan menggerogoti nilai-nilai kemanusiaan dari mereka sendiri.

Walaupun terpilih dua kali berturut-turut tapi anggapan kalangan mahasiswa terhadap presiden SBY ini masih sangat miring. Dikarenakan yang dia utamakan adalah membangun citra dirinya sendiri. Tapi dia tidak membangun sama sekali citra bangsa sebagai identitas dari warga Indonesia. Berapa kali sudah kebudayaan kita diklaim oleh Negara tetangga sebagai kebudayaan mereka berbagai provokasi dari pihak Malaysia sering kali dilancarkan kepada Negara kita, akan tetapi kita hanya terdiam dan membisu dan seakan-akan menutup mata akan semua itu. Senada dengan hal ini Birul SMI mengatakan bahwa:

“..... Negara ini adalah Negara yang besar tapi besarnya Negara ini tidak diimbangi dengan keberanian yang besar juga, jangankan manusia pulau-pulau yang ada di dalam kekuasaan Indonesia pun sudah tidak mau lagi bersatu dengan Negara penggalan surga ini. sudah berapa pulau yang terlepas dari Negara ini, kekayaan yang tak ternilai menjadikan Negara ini lalai dalam menjaga kekayaan tersebut, dua gunung emas yang ada di papua kini juga telah habis dan keuntungannya dibawa pergi ke negeri orang, ironisnya rakyat Indonesia yang disana masih bertahan dengan kotekanya, ketika buruh Freeport menuntut keadilan atas gaji yang mereka terima, disaat sebenarnya mereka mengambil emas dari tanahnya sendiri

tapi mereka dibayar sangat sedikit dibanding pekerja di Negara lain, toh apa tindakan presiden berikutnya, pertanyaannya dia SBY membela Freeport atau lebih membela rakyatnya, dan jawabannya sepertinya sudah bisa ditebak yakni dia lebih membela 1% keuntungan emasnya daripada nasib rakyat yang ada disana. Menjaga materi Negara sudah gagal ditambah dengan kegagalan dalam mempertahankan kebudayaan bangsa. Jika seluruh rakyat Indonesia sadar tentang kebodohan pemimpinnya mungkin mereka semuanya malu menyematkan nama Indonesia di dada mereka. belum selesai semua kasusnya para elit politik kita justru sedang berlomba-lomba dalam mengkorupsi uang rakyat. Disaat yang bersamaan pula kesadaran mahasiswa sebagai *agen of change* sudah menurun eksistensinya, yang bisa saya lakukan dan teman-teman yang ada disini hanya turun ke jalan dan berharap serta berdoa mata hati mereka bisa dibukakan agar bangsa ini bisa menjadi lebih baik lagi. Regulasi tentang batas dua kali menjadi presiden memang merupakan penghindaran dari terciptanya suatu rezim baru, akan tetapi jika aktor intelektualnya tetap orang yang sama maka sama saja untuk saat ini dan selamanya kita akan hidup dalam papan catur permainan mereka.<sup>44</sup>

Dewasa ini dapat kita lihat dengan jelas bahwa sama halnya dengan sekolah SMA atau SMP kampus pun juga saling berlomba-lomba untuk menwarkan kalau dirinya yang terbaik. Bukan karena alasan ketika pemerintah lepas tangan sepenuhnya terhadap dunia pendidikan maka cara satu-satunya adalah memperoleh mahasiswa sebanyak-banyaknya agar pemasukan mereka juga besar, yang otomatis biaya perkuliahannya pun juga semakin melangit. Hal inilah yang menjadi penghambat terbesar bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tapi selalu terbentur dengan biaya. Pada akhirnya yang bisa masuk bangku kuliah mereka anak-anak kaum borjuis yang sama sekali tidak memiliki kepekaan terhadap rakyat-rakyat yang sedang tertindas. Mereka yang golongan menengah kebawah harus rela menggantungkan cita-cita ingin berpendidikan tinggi dan dialihkan untuk bekerja saja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi pertanyaan yang paling mendasar adalah

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Birul SMI pada tanggal 05 April 2012



mereka mau bekerja sebagai apa? Paling banyak terjadi para lulusan SMA ini pasti memilih dunia industry sebagai alternative terakhir untuk mendapatkan sebuah penghidupan yang baru.

Bukan sesuatu yang baru kiranya ketika mereka sudah terjebak di dunia industry yang mereka dapat adalah hidup yang monoton, tanpa mereka sadari masa-masa produktif mereka telah selesai begitu saja, dan kehidupan mereka tidak mengalami perubahan sedikitpun. Adapun yang bisa sukses maka prosentasenya Cuma sekitar 1:1000. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Keceng dari GMNI:

Kelesuan dunia kampus dewasa ini bukan tanpa sebab, orientasi akan kemampuan hasil lulusan sekarang menjadi faktor utama yang mereka kejar. Universitas mana yang mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih luas maka itu yang paling digemari. Mahasiswa dituntut untuk membayar biaya perkuliahan yang lebih tinggi, dikejar SKS dan dipaksa memperoleh IPK yang tinggi, karena jika tidak apa yang mereka inginkan dari awal tidak akan tercapai. Ketika konsentrasi mereka hanya berfokus pada perkuliahan saja, ajakan untuk membela kepentingan rakyat dan teriakan untuk turun ke jalan hanya sebagai tontonan saja bagi mereka. Kita yang masih mencari keadilan untuk rakyat Indonesia ini dikatakan sebagai orang-orang yang tidak punya kerjaan. Ketika kita mengadakan aksi di jalanan bukan dukungan yang kita dapat malahan cemoohan yang selalu menghampiri kita yang dikatakan masyarakat sebagai faktor utama penyebab macetnya jalanan Surabaya. Mereka tidak sadar dibawah sengatan terik matahari dan panasnya aspal dibawah kaki, kita berteriak untuk membela hak-hak rakyat yang diambil paksa oleh pemerintah untuk kepentingan pribadinya saja. Tiap kali kita selesai aksi maka banyak diantara teman-teman mahasiswa kita bertanya “dapat apa kalian aksi tadi?” sesungguhnya pertanyaan yang sangat substansial tapi juga ada nada ejekan. Karena terkadang di setiap akhir dari aksi yang kita lakukan lagi-lagi kita juga mempertanyakan apakah teriakan kita tadi masih bisa terdengar oleh para penguasa.<sup>45</sup>

Hal yang sebenarnya menjadi inti dari semua ini adalah apa yang kita rasakan tak ubahnya hanya sebagai perulangan pada zaman dulu. Bangsa ini tetap

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Keceng GMNI

stagnan ditempatnya berdiri sejak pasca kemerdekaan lalu. Kita terus menerus terjebak dalam permainan politik dari pihak penguasa, segala bentuk kebijakan yang dibuat dan keputusan yang diambil pasti tidak terlepas dari kepentingan golongan masing-masing, jika sistem perpolitikan tidak berhenti di wilayah pemilu dan terus dilakukan sampai pada saat dia menjabat maka apa jadinya Negara ini. bukan rakyat lagi yang difikirkan melainkan bagaimana mereka bisa menang di pemilu mendatang.

Sungguh ironis memang ketika rakyat sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, memang pada manifestonya kita adalah Negara demokrasi akan tetapi pada kenyataannya kita ini sebenarnya Negara Monarkhi Absolut. Kita bisa lihat dipemerintahan kita ketika eksekutif dan legislative sudah dikuasai oleh golongan tertentu maka hal ini sama saja tidak ada keduanya karena mereka saling jalan beriringan dan saling mendukung kebijakan antara yang satu dengan yang lain. Bagaikan dalam drama-drama dalam pentas teater mereka seakan-akan memainkan peran-peran yang berbeda padahal disutradarai oleh orang yang sama. Kebohongan public disebar dimana-mana, masa kampanye pemilihan merupakan saat yang paling tempat untuk mengobral janji dan slogan-slogan yang membangun akan tetapi tidak pernah menemui titik temu antara keduanya, hal ini senada dengan komentar yang diucapkan oleh Amar LDF Surabaya bahwa;

Perihal yang selama ini kita dengar dari pemerintah tak ubahnya hanya sebatas pencitraan dan kebohongan public semata. Nasib rakyat dibuat sebagai alat politik untuk mendapatkan simpati dari rakyat, kasus terkuat yang menopang semua itu adalah permainan harga BBM pada tahun 2007 menjelang pemilihan presiden berikutnya, pada saat itu kita memang sedikit banyak terdiam dikarenakan saya kira memang kondisi Negara pada saat itu sedang krisis sampai pada saya mengetahui fakta bahwa pola

kenaikan dan penurunan BBM sudah di setting sebelumnya. Apalagi rakyat kecil kita disuap dengan menggunakan BLT(bantuan langsung tunai), dan hal itu juga yang mereka gunakan sebagai senjata dalam kampanye-kampanye mereka berikutnya. Dengan jargon presiden yang bisa menurunkan harga BBM dan pemberian BLT menjadikan itu sebagai senjata yang ampuh dalam menaklukkan hati rakyat yang tidak tahu menahu soal perpolitikan.dan ketika hal itu akan terulang lagi pada tahun 2012 ini saya orang pertama yang menentang keras hal itu, karena pada saat ini juga akan mendekati proses pemilu pada tahun 2014 jika kita tidak segera bergerak maka hal yang sama akan terjadi lagi untuk kedua kalinya dan lagi-lagi nasib rakyat yang dijadika tumbal akan semua ini. dapat kita lihat dengan jelas ketika pembahasan masalah kasus ini berlangsung banyak diantara mereka para partai politik saling berebut simpati rakyat. Mengatasnamakan diri mereka yang terdepan dalam membela hak-hak rakyat. Tapi segala tipu daya ini tidak akan berhenti sampai sini. Tidak hanya elemen mahasiswa para kaum buruh pun juga bersatu dalam mengadakan aksi demonstrasi mulai tanggal 26 sampai 31 maret tahun 2012. Meskipun tidak semuanya murni atas nama rakyat banyak diantaranya juga yang ditunggangi oleh partai-partai oposisi yang memang pada eksistensinya selalu memposisikan diri kontra dengan pemerintahan.<sup>46</sup>

Pada akhir bulan maret itu seakan-akan seluruh jalan di pusat kota Surabaya tidak lagi digunakan sebagai jalan untuk mobil melainkan untuk jalan kaki ribuan massa aksi yang memadati beberapa titik sentral yang ada di Surabaya yakni di Grahadi, Kantor DPR Kota Surabaya, Kantor PEMPROV Jatim serta Kantor DPRD Jatim. Beberapa tempat itu yang menjadi pusat aksi selama akhir bulan maret itu. Dan hal ini juga dijawab dengan ribuan aparat yang menjaga lokasi-lokasi tersebut disertai dengan pagar kawat berduri dan berbagai perisai dan senjata di tubuh mereka. kota Surabaya pada saat itu seperti mengulang pada tanggal 10 November pada masa pasca kemerdekaan baku hantam antara pendemo dan pihak aparat tidak terelakkan lagi, pada setiap massa aksi yang datang pasti terjadi bentrok disana, seperti penuturan dari jakfar PMII”

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Amar LDF Surabaya pada tanggal 06 April 2012

“kami memang memilih tanggal 28 Maret sebagai hari untuk aksi PMII se Jawa timur, karena jika kita melaksanakan aksi pada tanggal 27 kita akan berbarengan dengan massa aksi dari PDI Perjuangan yang jumlahnya sangat banyak. Hal ini kita lakukan agar masa aksi kita terhindarkan dari pandangan orang bahwa kita memblok pada salah satu partai oposisi. Kita memilih melakukan aksi di DPRD Jatim karena menurut kami itu adalah tempat yang strategis dan mengingat bahwa kantor perwakilan rakyat Jawa timur juga ada disana. Kedatangan kami sama seperti yang lainnya yaitu disambut dengan ratusan aparat juga dengan bersenjata lengkap, massa aksi kita pada saat itu sekitar 500 orang karena memang kita mengerahkan kader PMII se Jawa timur, kita menggunakan kendaraan truck dan sebagian lainnya menggunakan motor. Ketika aksi sedang berjalan begitu banyak aksi-aksi provokasi yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian, sampai pada mereka menembakkan gas air mata kedalam truck yang di dalamnya terdapat wanita juga, banyak yang pingsan atas kejadian itu, dan hal ini juga menyulut emosi sekian banyak masa aksi yang ada disana dan bentrokpun tidak dapat dihindari lagi.<sup>47</sup>

Memang pada akhir bulan itu kondisi kota Surabaya sangat mencekam.

Disemua pinggir jalan utama pasti ada penjagaan dari pihak kepolisian. Hal ini semua dilakukan hanya untuk satu hal yakni agar supaya rakyat tidak dipermainkan lagi, dan tidak dijadikan tumbal atas maneuver-maneuver politik yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Pada akhirnya harga BBM tidak jadi naik dan ini semakin jelas bagi kami, jika kita tidak mengadakan aksi besar-besaran seperti di akhir maret maka hal yang sama seperti pada tahun 2007 akan terulang lagi untuk yang kedua kalinya. Dan lagi-lagi nasib rakyat yang akan terus dipakai taruhan atas segala kebijakan yang sangat syarat dengan kepentingan golongan didalamnya.

### **C. Analisa Data**

Dalam mempertahankan kedaulatan Negara memang bukan merupakan hal yang remeh, akan tetapi tidak hanya dalam hal mempertahankan menjaga agar

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan jakfar PMII pada tanggal 06 april 2012

proses Negara berdaulat itu tetap berlangsung merupakan hal tersulit dari semua ini. jika terlahir pemimpin-pemimpin yang sangat dictator dan merampas semua hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh rakyat maka apa masih pantas Negara tersebut disebut sebagai Negara yang berdaulat. Mengedepankan kepentingan individu dan golongan bukan lagi kepentingan rakyat, berpolitik memang sesuatu yang tidak bisa dihindarkan dalam berkehidupan bersama, namun tidak adakah celah sedikitpun untuk membahas bagaimana yang baik untuk rakyat, bukan lagi yang baik untuk presiden dan menteri-menterinya ataupun untuk para anggota DPR di kursi panas mereka masing-masing.

Gerakan sosial muncul sebagai sebuah bentuk perlawanan terhadap tirani yang sedang berkembang biak yang mayoritas di pelopori oleh massa terdidik yang mana ketika sudah berada di jalan seluruh status kemahasiswaannya akan dilepas dan selalu memosisikan diri sebagai *civil society*. Agaknya mungkin idealism semacam ini memang hanya dimiliki oleh warga pergerakan, walaupun tidak dapat dipungkiri terkadang idealism mereka juga dapat terbeli dengan tipu daya dari pihak penguasa yang senantiasa ingin melucuti gerakan-gerakan sosial yang terus disuarakan oleh mahasiswa.

Dalam melancarkan aksinya gerakan sosial pada saat ini sudah tidak lagi sama dengan gerakan sosial pada zaman Marx dulu yang hanya memfokuskan pada determinisme ekonomi dan perjuangan buruh saja, melainkan lebih mengarah pada perjuangan hak asasi manusia yang dilanggar dan yang lain sebagainya. Walaupun masih ada yang namanya kelas penguasa dan kelas tertindas akan tetapi yang membedakan disini adalah ketertindasan ini bisa diperjuangkan dan lebih

nyata hasilnya daripada realisme utopis Marx dalam menghapuskan kelas secara permanen, didalam gerakan sosial yang baru ini perubahan itu bisa kita dapatkan tanpa merubah tatanan structural masyarakat. Ketika demokrasi dalam arti sebenarnya diberlakukan maka kekuatan terbesar ada di tangan rakyat bukan untuk menghancurkan akan tetapi mencari jalan keluar secara mufakat untuk kepentingan bersama. Sesuai dengan sila pancasila yang keempat yakni *“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.”*

Sudah lama ketegangan ini terjadi dan akan terus terjadi jika Negara ini masih belum menemukan pemimpin yang benar-benar bisa membawa bangsa ini menuju apa yang dimaksud oleh sila kelima dasar Negara Indonesia yakni Pancasila tentang *“Keadilan sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”* selama masa itu belum datang maka tiap kali ada kebijakan public yang tidak memihak kepada rakyat dapat kita lihat bersama jalan-jalan kota pada saat itu masih dan akan terus dibanjiri oleh suara-suara gerakan mahasiswa yang terus membela rakyat kecil. Suara mereka tidak akan putus walaupun dicekik dengan kehidupan kampus yang semakin menjerat mereka akibat berlakunya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan.

Ketika segala biaya ditanggungkan kesemuanya kepada perguruan tinggi maka sudah jelas lemparan terakhirnya lagi-lagi ada di pundak mahasiswa. akan menjadi sesuatu yang sulit ketika harus memilih antara menjadi seorang aktivis kampus dengan segala rutinitas yang padat selain hanya belajar di bangku kuliah, dengan menjadi mahasiswa murni yang hanya mementingkan nilai ataupun

capaian pada saat perkuliahan seperti orang yang sudah memakai kaca mata kuda, yang dapat mereka lihat hanya yang ada di depan mereka, sekalipun mereka tidak dapat melihat samping kiri ataupun samping kanan mereka dimana rakyat butuh akan pendampingan mereka.

Lagi-lagi pengulangan sejarah yang terjadi, hal ini sama seperti pemberlakuan NKK/BKK pada zaman orde baru. Sama dalam arti proses mematikan idealisme mahasiswa bahkan sejak dirumah mereka sendiri yakni di dunia kampus. Dan pada masa ini hasilnya lebih baik dari pada masa orde baru, sebagai bukti garis perlawanan dan gerakan semakin memudar di kalangan mahasiswa, yang terlahir di kampus hanyalah mereka yang egois, individualis serta apatis, terhadap segala sesuatu yang ada di sekitar mereka. Maka dari itu arah gerakan sosial juga harus menemukan bentuknya yang baru agar selalu bisa melakukan control terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.

Memang kita tidak bisa lagi mengulangi kejadian gerakan pada masa yang lalu, dikarenakan kekuatan politik dari masa ke masa akan semakin menguat juga. Hal yang tak bisa mereka sentuh sampai saat ini adalah jika mahasiswa sudah berkumpul dan melakukan konsolidasi diantara sesama mereka, dan lagu-lagu perlawanan senantiasa masih dinyanyikan oleh mereka, maka gerakan-gerakan itu tidak akan mati jika kesamaan culture perlawanan yang kita miliki tetap sama yakni memberikan perlawanan terhadap pemerintah jika sudah tidak memihak lagi terhadap rakyat.

Tidak hanya dalam UU BHP yang melatarbelakangi timbulnya gerakan mahasiswa besar-besaran di Surabaya. Kebobrokan moral pemerintah yang jelas-jelas sudah melakukan kecurangan dalam menjalankan roda Negara juga merupakan penyebab utama mengapa presiden SBY harus turun dari jabatannya. Kasus aliran dana BI ke bank Century hanya salah satu dari kasus yang tidak jelas sampai sekarang bagaimana akhir ceritanya. Para pelakunya pun juga sedang mencari kesibukan baru di luar negeri. Begitu mudahnya sebuah kasus yang ditutup gara-gara yang terjerat adalah para penguasa Negara sendiri. Dan sama seperti sebelumnya ketika zaman Orde baru ketika semua kasus yang melibatkan Soeharto begitu saja ditutup tanpa alasan yang jelas. Seakan-akan memang bukan suatu kebetulan yang disengaja semua perulangan ini bisa terjadi.

Dalam bentuk gerakannya mahasiswa dalam satu waktu dapat tercipta dua model tipe gerakan Resource Mobilization theory (RMT) yakni seperti “political interactive model”, model ini lebih menekankan pentingnya perubahan struktur bagi aksi kolektif, keberadaan jejaring, serta kaitan horizontal yang telah terbangun dengan kelompok tertindas sebagai faktor penentu keberhasilan gerakan sosial. Model ini menempatkan relasi gerakan sosial dengan Negara dan bingkai sistem politik yang ada sebagai determinan yang penting bagi keberhasilan gerakan sosial. Hal ini dapat kita lihat ketika kebijakan pemerintah tentang kenaikan harga BBM akan dilaksanakan pada tanggal 1 April 2012 kemarin, tujuan utama bagi mahasiswa pada saat itu adalah dengan membatalkan rencana pemerintah tersebut. Dikarenakan pada saat penguasa bermain spekulasi



dalam menentukan kebijakan public maka jika ada kesalahan di dalamnya maka rakyat lah yang menjadi korban. Akan tetapi sebaliknya jika spekulasi itu berhasil maka itu di klaim sebagai keberhasilan dari pihak mereka.

Pada faktanya ketika gelombang aksi besar-besaran terus dilancarkan banyak dari partai politik yang melihat peluang untuk mengidentifikasi dirinya adalah partai yang pro terhadap kepentingan rakyat tapi itu semua hanyalah sebuah gesture saja untuk mendapat simpati dari rakyat. Dan hasil dari semua itu ketika harga BBM tidak jadi dinaikkan harga CPO pun juga tidak mengalami kenaikan sampai di atas 15% bahkan sekarang harga minyak dunia malah mengalami penurunan yang sangat tajam. Ini merupakan suatu bukti dimana memang pada saat yang benar-benar kritis perubahan kebijakan atau struktur yang ada di dalamnya merupakan wajib adanya karena sudah menyangkut kepentingan rakyat.

Sedangkan dalam ranah konsolidasi dan penggalangan massa bentuk gerakan sosial yang ada di Surabaya juga menggunakan RMT model yang kedua yakni “organizational entrepreneurial model” yang mana membedakan antara gerakan sosial, organisasi gerakan sosial (social movements organizations), industry gerakan sosial (social movements industry) dan sector gerakan sosial (social movement sector). organisasi gerakan sosial adalah suatu organisasi yang kompleks atau formal yang mengidentikkan tujuannya dengan preferensi dari gerakan sosial dan berusaha mewujudkan pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Kumpulan organisasi gerakan sosial yang menjadikan pencapaian preferensi gerakan sosial tertentu sebagai tujuannya pada akhirnya akan membentuk suatu

industry gerakan sosial. Dan secara agregat pada akhirnya beragam industri tersebut (terlepas dari induk gerakan sosialnya) akan membentuk sector gerakan sosial. Dalam konteks kemajemukan tersebut, organisasi gerakan sosial memainkan peran penting karena merupakan ujung tombak memobilisasi sumberdaya bagi bagi pencapaian tujuan gerakan sosial.

Hal ini sama dengan data di atas ketika organisasi gerakan sosial tidak pernah memiliki bentuknya yang tetap, karena berbagai organisasi gerakan sosial yang ada di Surabaya selalu akan membentuk sebuah perkumpulan dan aliansi baru sebagai wadah mereka, hal ini dilakukan karena jika mereka bergerak tanpa adanya suatu konsolidasi yang baik maka mereka tidak akan mendapat apa-apa. Dengan bersatu dan mengumpulkan organisasi gerakan sosial yang ada di Surabaya massa mereka menjadi sangat massive dan tuntutan-tuntutan yang mereka bahas menjadi lebih matang karena dikaji dari berbagai elemen kemahasiswaan lintas angkatan dan lintas universitas.

Dikarenakan jika konsolidasi tidak dilakukan maka kita akan terpecah menjadi organisasi-organisasi gerakan sosial yang kecil. Dan tidak menimbulkan efek yang besar ketika mengadakan aksi. Terkadang bisa terjadi peleburan massa juga ketika ada di lapangan. Memang hal ini sangat berbahaya jika dilihat dari sisi pengkondisian massa, kita tidak akan lagi mengetahui mana massa kita dan mana penyusup yang akan memprovokatori aksi kita. Maka dari itu sebelum penggabungan itu dimulai masing-masing koelap harus bertemu dan menyepakati peraturan untuk menghandle massanya sendiri walaupun aksinya dijadikan satu.

Ini akan menjadi keuntungan karena dengan bertambahnya massa aksi kesempatan kita dalam menarik perhatian pemerintah akan lebih besar.

Sama halnya dengan kerusuhan Mei 1998 jika aliansi mahasiswa pada saat itu tidak besar pasti akan habis oleh peluru aparat, dan nyali mereka akan menjadi ciut seketika. Dengan membawa jumlah massa yang besar barisan kita dan semangat kita akan lebih besar pula karena tidak hanya kita yang memperjuangkan nasib rakyat Indonesia ini. Rasa senasib dan sepenenderitaan menjadi aspek terpenting dalam meleburkan jiwa individu masuk menjadi satu dengan seluruh peserta aksi yang ikut. Hal inilah yang menyebabkan tiap kali kita berhadapan dengan pihak kepolisian tidak ada rasa takut sedikitpun.

Aksi yang terus terjadi pada 4 hari terakhir berturut-turut di bulan maret itu memang merupakan puncak dari kekesalan mahasiswa atas permainan politik yang dilancarkan oleh pihak pemerintah. Tidak hanya sampai disitu pasca aksi pun kita masih memperjuangkan sahabat-sahabat kita sesama mahasiswa yang tertangkap oleh petugas kepolisian. Mereka ditahan paling lama 5 hari untuk penyidikan, jika terbukti mereka bersalah dalam hal perusakan atau anarkisme maka mereka bisa ditahan.

Tidak ada keadilan saat kita sedang mengadakan aksi dijalanan, jadi kalau kita ingin mengganggu sang raja lebih-lebih mau menurunkannya maka kita akan berhadapan terlebih dahulu dengan bala tentaranya. Ketika bentrok itu terjadi sudah tidak ada lagi hukum yang berlaku disana, ya kita benar-benar diposisikan sebagai dua musuh yang saling menyerang antara satu dengan yang lain. Yang

membedakan cuma satu jika massa aksi lebih banyak maka kita tidak akan melakukan penyerangan terhadap pihak kepolisian namun tidak terjadi sebaliknya jika massa dari aparat kepolisian yang lebih banyak maka mereka selalu menyerang mahasiswa dengan dalih membubarkan aksi karena mengganggu ketertiban. Pasca bentrok luka-luka memar dan kulit yang sobek menjadi pemandangan yang biasa bagi kita, sudah tertutup atau belum luka itu jika kebijakan belum di ubah maka kita akan turun lagi ke jalan sampai tuntutan kita dipenuhi. Dikarenakan semua akan menjadi sebuah kesia-siaan saja jika apa yang kita lakukan tidak kita kawal sampai selesai. Akhir dari perjalanan aksi mahasiswa di berbagai tempat pun akhirnya menemui hal yang sama, gesturre politik yang dimainkan oleh pihak penguasa selalu memposisikan diri sebagai penyelamat Negara. Klaim bahwa pemerintah mampu tidak menaikkan harga BBM untuk kepentingan rakyat menjadi bukti konkrit bahwa rakyat hanya dijadikan lapangan permainan saja bagi mereka. pencitraan yang tiada habisnya oleh presiden SBY seperti memberi parfum pada bangkai yang mana pada akhirnya tetap saja tercium kalau itu adalah bangkai. Dapat kita bayangkan jika seandainya saja tidak ada aksi besar-besaran mahasiswa dalam menolak semua kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat sampai pada suatu upaya penurunan presiden apakah dia yang dikatakan sebagai kepala Negara mau untuk tidak menaikkan harga BBM? Bukti konkrit yang dapat kita lihat sekarang elektabilitas dari partai yang memback up presiden sekarang menurun drastic. Selain dikarenakan dengan banyaknya kader partai yang terlibat kasus korupsi mosi tidak percaya kepada pencitraan presiden juga menentukan penurunan ini. banyak

diantara mereka yang menjadi pengurus inti partai terlibat korupsi proyek-proyek Negara. Semakin terlihat kebobrokan yang mereka lakukan selama ini. pertanyaan terakhir yang perlu kita ajukan cuma satu apakah kroni-kroni dari pihak penguasa jika melakukan kesalahan juga mendapat hukuman yang setimpal sama dengan yang lain, atau kasus-kasus mereka sama dengan kasus century yang para pelakunya bisa terbebas dari segala tuntutan bahkan bisa menjadi seorang wakil presiden, dan apakah semua kasus yang terjadi lagi-lagi sama seperti berakhirnya masa orde baru dimana tidak ada keadilan sama sekali di dalamnya. Hal ini yang layaknya juga harus kita perhatikan karena kesalahan terbesar mahasiswa adalah bisa membuka sebuah kasus tapi tidak bisa menyelesaikannya.

Dewasa ini peranan media juga sangat sentral. Karena hanya melalui media saja kita dapat melakukan mengetahui apa saja yang terjadi di Negara ini terlepas dari siapa owner dari media-media tersebut. Diskusi-diskusi tentang kebijakan pemerintah dengan mendatangkan langsung pakar beserta orang yang bersangkutan akan lebih menambah khazanah kajian isu dikalangan mahasiswa. tidak dipungkiri bahwa sistem koalisi dan oposisi tidak hanya terjadi di gedung MPR bahkan perang di media lebih seru ketimbang sidang paripurna itu sendiri. Saling mempertahankan argument di depan para pakar membuat isu-isu yang dikaji semakin variatif, jadi maneuver media sekarang yang tidak hanya menyampaikan berita melainkan membedahnya terlebih dahulu merupakan terobosan baru dalam wahana demokrasi di Indonesia.

Berbagai gerakan sosial yang terjadi bukanlah sebagai bentuk untuk merusak tatanan yang sudah ada. Melainkan hanya difokuskan sebagai pembelaan

terhadap rakyat kecil sebagai bentuk tegaknya demokrasi di Negara ini. yang seharusnya didengar oleh pihak penguasa bukanlah suara partai melainkan suara rakyat. Hal yang mungkin sangat menyedihkan ketika kita melihat sidang paripurna di MPR. Para wakil rakyat yang duduk disana bukan berbicara atas nama rakyat lagi, para ketua majelis disana tidak bertanya anda dari daerah pilihan mana? Siapa konstituen anda? Apa keputusan konstituen anda mengenai hal ini? kita tidak pernah mendengar kata-kata seperti itu, fakta yang terjadi pada sidang yakni “ANDA DARI FRAKSI APA?” dari sini dapat kita lihat mereka bukan membawa kepentingan rakyat namun justru mereka membawa kepentingan partai mereka masing-masing. Ketika terjadi sebuah pengambilan keputusan lewat voting atau hak angket, bukan rakyat yang ditanya tapi ketua partai yang ditanya mau diarahkan kemana suara mereka. bahkan mereka yang tergabung dalam partai-partai koalisi harus mengikuti kemauan dari partai pemegang koalisi tersebut. Pertanyaan yang paling real adalah apakah Negara ini masih dikatakan sebagai Negara yang berdaulat.

Ketika wakil-wakil kita yang di DPR sudah tidak dapat lagi menyampaikan aspirasi kita kepada penguasa maka jalan satu-satunya yang bisa dilakukan adalah dengan turun ke jalan dan membawa satu harapan bahwa langkah kaki dan teriakan ini bisa mengembalikan kekuasaan kembali ke tangan rakyat. Memang bukan pilihan yang mudah memiliki bentuk Negara demokrasi dimana kita menempatkan kepentingan bersama diatas kepentingan golongan masing-masing. Namun hanya dengan sistem inilah rakyat masih bisa memperjuangkan hak-haknya kepada pemerintah. Dan dari pihak pemerintah pun

tidak dapat mengabaikannya begitu saja, karena jika gerakan sosial ini diabaikan maka seluruh rakyat Indonesia bisa jadi turun ke jalan semua sama halnya yang terjadi di Negara-negara yang ada di timur tengah.

Agenda penurunan presiden bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Di Era Soekarno dan Soeharto memang sudah pernah terjadi. Hal ini di isukan memang jika presiden sudah benar-benar tidak dapat diterima lagi arah kebijakan yang mereka buat. Tuntutan penurunan presiden merupakan ancaman serius jika dia tidak merubah struktur kebijakan untuk lebih di tangan rakyat. Dikarenakan jika presiden salah mengambil kebijakan akan menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat, contohnya saja ketika undang-undang tentang outsourcing diberlakukan maka sampai sekarang rakyat Indonesia sudah tidak dapat lagi bekerja dengan tenang, bahkan presiden yang dalam tiap kali dalam kampanyenya mengatakan mampu menghapuskan sistem outsourcing ini toh sampai sekarang tidak ada realisasi yang jelas dan tanda-tanda akan dihapusnya sistem itu.

Hal inilah yang menyebabkan perlunya control dari masyarakat terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Jika memang sama sekali tidak memihak kepada rakyat jangan salahkan jika rakyat sudah bersatu maka bisa saja menggulingkan satu pemerintahan penuh dalam sekali waktu. Maka dari itu gerakan mahasiswa sebagai perwakilan dari *civil society* bukanlah suatu hal yang dapat diremehkan. Ketika semua berjalan pada garisnya maka demokrasi di suatu Negara bisa terbentuk tentunya dengan mengakomodir seluruh aspirasi rakyat dan menempatkan kepentingan bersama di atas segalanya.